



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: PER- 014 /A/JA/ 03/2009**

TENTANG

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA TAHUN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas pegawai Kejaksaan terutama peningkatan pengetahuan dan wawasan dengan spesialisasi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Perdata dan Tata Usaha Negara Tahun 2009;
- b. bahwa karena itu dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Perdata dan Tata Usaha Negara Tahun 2009 perlu ditetapkan perangkat kendali pendidikan, khususnya program Pendidikan dan Pelatihan beserta kerangka Mata Pelajarannya (kurikulum);
- c. bahwa untuk perwujudannya dipandang perlu diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (LN Tahun 2004 No.67 TLN 4401);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/A/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-558/A/JA/12/2003, tanggal 17 Desember 2003;
4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :PER-068/A/JA/7/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2009 Nomor: SP.0035.0/006.01.0/-/2009, tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA TAHUN 2009.**

KETUJUH : Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan

Biaya penyelenggaraan Diklat dibebankan seluruhnya pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI tahun 2009 Nomor SP.0035.0/006.01.0/-/2009 tanggal 31 Desember 2008.

KEDELAPAN : Tanggung Jawab Diklat

Kepala Pusat Diklat bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perdata dan Tata Usaha Negara Tahun 2009.

KESEMBILAN : Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI.
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

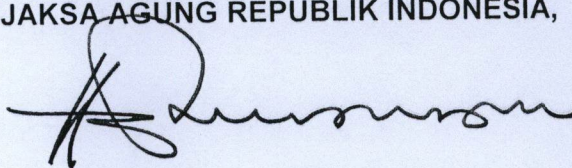
SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Yth. Para Jaksa Agung Muda di Jakarta.
4. Yth. Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI di Jakarta.
5. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI di Jakarta.
6. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI di Jakarta.
7. Yth. Para Kepala Kejaksaan Tinggi diseluruh Indonesia.
8. Arsip.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Maret 2009

19/12/09 JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT			
No	Isi	Waktu	Tanggal
1	Ke	16-03-09	120309
2	Ke	11-3-09	
3	Ke	11-3-09	
4	Ke	11-03-09	
5	Ke	11-03-09	

LAMPIRAN PERATURAN JAKSA AGUNG RI.

Nomor : PER- 014 /A/JA/ 03 /2009

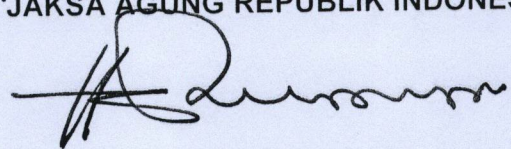
Tanggal : 30 Maret 2009

**KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA TAHUN 2009
1 BULAN = 220 JAM PELAJARAN**

NO.	NAMA PELAJARAN	WIDYAIKWARA/ PENGAJAR	RINCIAN JAM				
			TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	KELOMPOK PERDATA						
1.	Prudential Banking	Biro Hukum BI	8	-	-	2	10
2.	Hukum Perbankan dan Permasalahan-permasalahannya	Biro Hukum BI	8	2	-	2	12
3.	Hukum Perdata Internasional	Struktural JAM DATUN	6	3	1	2	12
4.	Teknik Pembuat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan Perkara Perdata dan TUN	Drs. Santoso, SH., MH.	8	-	5	2	15
5.	Non Litigasi	Rifki Alfian, SH	6	3	1	2	12
6.	Perseroan Terbatas	Endang Lestari Gurnitowati, SH., MM.	8	-	-	2	10
7.	Masalah Class Action, Legal Standing, Citizen Law Suit dan Acara Peradilan dalam Praktek Peradilan di Indonesia	Maria Bernadette, SH	9	-	4	2	15
8.	Bedah Perkara Perdata dan TUN	Drs. Santoso, SH., MH.	4	0	10	2	16
II	KELOMPOK TATA USAHA NEGARA						
1.	Beberapa pengertian dalam hukum TUN a. Kewenangan Dikresioner b. Wewenang Atribut dan delegasi mandat c. Keputusan TUN	Struktural JAM DATUN	8	2	-	2	12
2.	Perkembangan HAN materiil	Endang Lestari Gurnitowati, SH., MM.	9	1	-	2	12
3.	Teknik Pembuatan Kontrak/ Perjanjian	R. Wiyono, SH	6	-	4	2	12
4.	Peradilan Niaga dan Kepailitan	Diklat Kehakiman	4	-	3	2	9
5.	Gugatan Yudicial Review dan Makamah Konstitusi	Makamah Kontitusi	6	2	2	2	12
6.	Arbitrase	BANI	4	-	3	2	9
7.	Upaya Hukum Perkara Perdata a. Banding b. Kasasi	Rifki Alfian, SH	6	2	5	2	15
8.	Peninjauan Kembali Studi Kasus	Struktural JAM DATUN	4	-	10	2	16
III	KELOMPOK SIKAP, MENTAL DAN PERILAKU DISIPLIN						
1.	PBB	Tim AL (Marinir)	3	-	7	2	12
2.	Out Bound						
IV.	KELOMPOK PENUNJANG						
1.	PKL		-	-	9	-	9
2.	Penggunaan senjata api laras pendek/ laras panjang.	Paket (tidak termasuk dalam jam pelajaran) Tim PASKHAS TNI AU dan Penyelenggara.					
Jumlah			107	15	64	35	220

NO.	NAMA PELAJARAN	WIDY AISWARA/ PENGAJAR	RINCIAN JAM				
			TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	CERAMAH						
1.	JAKSA AGUNG RI						
2.	JAM DATUN						
3.	KAPUSDIKLAT						
	Jumlah		-	-	-	-	-
	JUMLAH TOTAL		107	15	64	34	220

7¹⁹₁₃ 09 JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA		
No	ABAT	SP
1	Surat Widi	16. 16-03-09
2	Surat klat	17. 17-03-09
3	Surat	18. 11-3-09
4	Surat bid	19. 11-3-09
5	Surat ksana	20. 11-03-'09
6	Surat getik	21. 11-03-09